



The Effect Of The Implementation Of Government Accounting Standards (Sap) Pp No. 71 Of 2010 On Financial Performance At The Bpkpd Of Binjai City

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap) Pp No. 71 Tahun 2010 Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bpkpd Kota Binjai

Asri Septiani ¹⁾, Nancy Mayriski Siregar ²⁾, Miftha Rizkina ³⁾
^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi
Email: ¹⁾ septianiasri46@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [20 Maret 2026]
Revised [25 April 2026]
Accepted [30 April 2026]

KEYWORDS

Government Accounting Standards, SAP PP No. 71 of 2010, Financial Performance.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terhadap kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Binjai. Penerapan SAP berbasis akrual merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelaporan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data penelitian diperoleh dengan mendistribusikan kuesioner kepada 57 pegawai BPKPD Kota Binjai yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Teknik analisis data yang digunakan meliputi pengujian kualitas data, pengujian asumsi klasik, analisis regresi linier sederhana, uji t, dan koefisien determinasi dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) PP No. 71 Tahun 2010 belum memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan BPKPD Kota Binjai. Namun, implementasi SAP tetap memiliki hubungan positif dan berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan yang lebih teratur, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan manajemen keuangan dan menjadi acuan untuk penelitian lebih lanjut di bidang akuntansi sektor publik.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of implementing Government Accounting Standards (SAP) based on Government Regulation No. 71 of 2010 on the financial performance of the Regional Financial and Revenue Management Agency (BPKPD) of Binjai City. The implementation of accrual-based SAP is an effort by the government to improve accountability, transparency, and the quality of regional financial reporting. This study uses a quantitative approach with a survey method. The research data was obtained by distributing questionnaires to 57 employees of the BPKPD of Binjai City who were directly involved in regional financial management and reporting. The data analysis techniques used included data quality testing, classical assumption testing, simple linear regression analysis, t-test, and coefficient of determination with the help of the SPSS program. The results show that the implementation of Government Accounting Standards (SAP) PP No. 71 of 2010 has not had a significant effect on the financial performance of Binjai City BPKPD. Nevertheless, the implementation of SAP still has a positive relationship and serves as a guideline in preparing financial reports that are more orderly, systematic, and in accordance with the provisions of laws and regulations. This study is expected to provide practical contributions to local governments in their efforts to improve financial management and serve as a reference for further research in the field of public sector accounting.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah adalah aspek penting dari pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sejalan dengan tuntutan reformasi sektor publik, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas tinggi, relevan, dapat diandalkan, dan akuntabel kepada publik. Laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan, pemerintah menetapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual melalui PP. No. 71 Tahun 2010. Pelaksanaan SAP berbasis akrual diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas pemerintah daerah. Dengan standar yang seragam, laporan keuangan pemerintah diharapkan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan dapat dibandingkan antara periode dan antar entitas pemerintah. Namun, penerapan SAP tidak serta merta menjamin peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti efektivitas perencanaan anggaran,

pelaksanaan program, dan sistem pengendalian internal. Oleh karena itu, penting untuk meneliti sejauh mana penerapan SAP berperan dalam mendukung kinerja keuangan pemerintah daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Binjai merupakan salah satu lembaga daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010 terhadap kinerja keuangan di BPKPD Kota Binjai. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan praktik akuntansi sektor publik dan berfungsi sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.

LANDASAN TEORI

Teori Implementasi Kebijakan Publik

Teori implementasi kebijakan publik menjelaskan bagaimana suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif pada tingkat operasional. Keberhasilan penerapan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas pengguna kebijakan, tetapi juga oleh kejelasan tujuan, ketersediaan sumber daya, kapasitas pelaksana, dan koordinasi antar unit organisasi (Nugroho, 2020). Dalam konteks kebijakan keuangan publik, pelaksanaannya sering menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, resistensi terhadap perubahan, dan komunikasi birokrasi yang lemah. Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa kebijakan publik akan berjalan secara optimal jika didukung oleh komitmen aparat, sistem pengendalian internal yang memadai, dan dukungan teknologi informasi (Purwanto & Sulistyastuti, 2021). Oleh karena itu, penerapan kebijakan akuntansi pemerintah, seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), hendaknya dipandang tidak hanya sebagai kewajiban administratif tetapi juga sebagai proses pelaksanaan kebijakan yang memerlukan kesiapan organisasi dan konsistensi dalam pelaksanaannya agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif.

Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah pedoman resmi yang digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sistematis, transparan, dan bertanggung jawab. SAP berbasis akrual, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan dengan mencerminkan kondisi keuangan pemerintah secara lebih komprehensif, termasuk pengakuan aset, kewajiban, pendapatan, dan belanja (Halim, 2022). Implementasi SAP memungkinkan laporan keuangan pemerintah disajikan secara relevan, dapat diandalkan, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan antara periode dan entitas (Rinaldi & Yuliani, 2021). Dalam praktiknya, SAP berperan penting sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengalirkan pengelolaan keuangan publik, serta sebagai dasar bagi proses audit oleh lembaga audit. Dengan penerapan SAP yang konsisten, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan pemerintah daerah menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab guna mencapai tujuan pembangunan daerah. Kinerja keuangan tidak hanya diukur dari besarnya realisasi anggaran, tetapi juga sejauh mana anggaran digunakan secara optimal dan tepat sasaran (Mardiasmo, 2021). Kinerja keuangan umumnya diukur melalui analisis rasio keuangan, seperti rasio independensi, efektivitas, efisiensi, dan ekonomi, yang mencerminkan kondisi fiskal dan kualitas pengelolaan keuangan daerah (Halim, 2022). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAP merupakan sumber utama untuk menilai kinerja keuangan karena menyediakan data yang akurat dan dapat diandalkan. Dengan demikian, kinerja keuangan berfungsi sebagai indikator penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan sebagai alat pertanggungjawaban kepada masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

METODE PENELITIAN

Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS. Analisis ini mencakup uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan kualitas instrumen penelitian, diikuti dengan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya, analisis regresi linier sederhana diterapkan untuk menganalisis hubungan antar variabel, sementara uji parsial (t-test) digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Koefisien determinasi juga dihitung untuk mengetahui sejauh mana variabel independen menjelaskan variasi dalam kinerja keuangan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Bagian ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari pengolahan data kuesioner yang dikumpulkan dari responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai BPKPD Kota Binjai yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.

Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
Standar Akuntansi Pemerintahan (X)	Butir 1	0,838	0,266	Valid
	Butir 2	0,607	0,266	Valid
	Butir 3	0,618	0,266	Valid
	Butir 4	0,853	0,266	Valid
	Butir 5	0,635	0,266	Valid
	Butir 6	0,745	0,266	Valid
	Butir 7	0,726	0,266	Valid
	Butir 8	0,621	0,266	Valid
Financial Performance (Y)	Butir 1	0,667	0,266	Valid
	Butir 2	0,785	0,266	Valid
	Butir 3	0,427	0,266	Valid
	Butir 4	0,809	0,266	Valid
	Butir 5	0,546	0,266	Valid
	Butir 6	0,850	0,266	Valid
	Butir 7	0,635	0,266	Valid
	Butir 8	0,876	0,266	Valid

Sumber: Data Olahan (2025)

Berdasarkan hasil uji validitas, semua item pada variabel Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (X) dan Kinerja Keuangan (Y) memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari nilai r tabel yaitu 0,266. Dengan demikian, semua item dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Alpha Cronbach	Ketentuan Nilai Alpha Cronbach	Keterangan
Standar Akuntansi Pemerintahan (X)	0,908	>0,60	Reliable
Kinerja Keuangan (Y)	0,906	>0,60	Reliable

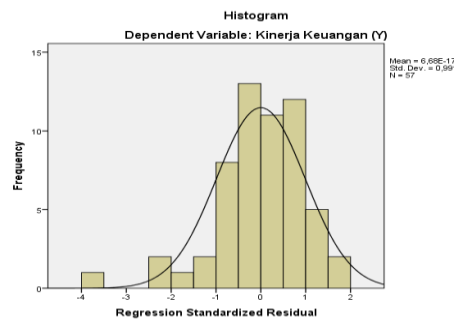
Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha > 0,60, sehingga instrumen penelitian dianggap reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

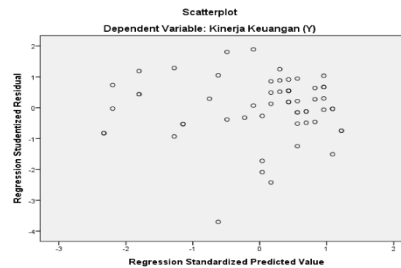
Unstandardized Residual		
N	57	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,000000
	Std.Deviation	2,74631962
Most Extreme Difference	Absolute	0,107
	Positive	0,068
	Negative	-0,107
Test Statistic		0,107
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,162 ^c

Gambar 1. Histogram Uji Normalitas



Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2 Scatterplot Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, grafik scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Sederhana

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	3,099	1,492		2,077	0,042		
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X)	0,921	0,049	0,931	18,930	0,000	1,000	1,000

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan (Y)
 Sumber: Olah Data SPSS (2025)

Hasil regresi menunjukkan bahwa penerapan SAP memiliki efek positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan dengan nilai koefisien sebesar 0,921 dan signifikansi 0,000 (< 0,05).

Uji Parsial (Uji T)

Tabel 5. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	TT	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,949	1,000		2,949	0,005
1 Application of Government Accounting Standards (X)	-0,032	0,033	-0,130	-0,973	0,335

a. Dependent Variable: Financial Performance (Y)
 Sumber: Olah Data SPSS (2025)



Berdasarkan hasil pengujian menggunakan program SPSS, diperoleh nilai t sebesar $-0,973$ dengan nilai signifikansi $0,335$. Nilai signifikansi ini lebih besar dari tingkat signifikansi $0,05$ ($0,335 > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa, secara parsial, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP No. 71 Tahun 2010 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan BPKPD Kota Binjai.

Koefisien Determinasi

Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,931 ^a	0,867	0,865	2,77117

a. Predictors: (Constant), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X)

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan (Y)

Sumber: Olah Data SPSS (2025)

Nilai R Square sebesar $0,867$ menunjukkan bahwa $86,7\%$ kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sedangkan $13,3\%$ dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar ruang lingkup penelitian ini. Nilai R sebesar $0,931$ menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara penerapan SAP dan kinerja keuangan.

Pembahasan

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP No. 71 Tahun 2010 pada BPKPD Kota Binjai

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010 pada BPKPD Kota Binjai telah berjalan dengan baik, yang ditunjukkan oleh validitas dan reliabilitas seluruh indikator penelitian. Aparatur BPKPD juga telah memahami dan menerapkan SAP berbasis akrual dalam pengelolaan serta pelaporan keuangan daerah.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa BPKPD Kota Binjai telah menjalankan ketentuan SAP sesuai regulasi yang berlaku, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan yang mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan arus kas. Penerapan SAP berperan penting sebagai fondasi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui Teori Implementasi Kebijakan Publik yang menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh kejelasan regulasi, kesiapan pelaksana, dan dukungan kelembagaan (Nugroho, 2020). Dalam perspektif Teori Stewardship, aparatur BPKPD Kota Binjai berperan sebagai steward yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan publik. Penerapan SAP membantu pelaksanaan tugas secara lebih terstruktur sehingga meminimalkan kesalahan dan potensi penyimpangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Nur Qadri (2021) dan Jos Martin Simanjuntak (2023) yang menyatakan bahwa penerapan SAP berbasis akrual mendukung penyusunan laporan keuangan pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas, meskipun tingkat implementasinya masih berbeda antarinstansi pemerintah daerah.

Kinerja Keuangan pada BPKPD Kota Binjai

Kinerja keuangan BPKPD Kota Binjai berada pada kategori cukup baik, yang tercermin dari pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah yang tertib, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam Teori Stewardship, kinerja keuangan yang baik mencerminkan peran aparatur BPKPD Kota Binjai sebagai steward yang mengutamakan kepentingan organisasi dan masyarakat, sehingga menunjukkan penerapan prinsip stewardship dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Yanima Halawa dan Hairatun Nazah (2023) yang menunjukkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual meningkatkan beberapa aspek kinerja keuangan, terutama rasio kemandirian dan efektivitas. Namun, tidak semua indikator kinerja keuangan mengalami peningkatan signifikan, sehingga kinerja keuangan juga dipengaruhi oleh faktor lain di luar penerapan SAP.

Pengaruh Penerapan SAP PP No. 71 Tahun 2010 terhadap Kinerja Keuangan pada BPKPD Kota Binjai

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa penerapan SAP PP No. 71 Tahun 2010 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan BPKPD Kota Binjai, dengan kontribusi yang besar dalam menjelaskan variasi kinerja keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan SAP, semakin baik pula kinerja keuangan yang dihasilkan, karena SAP memberikan pedoman yang jelas dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan sehingga meningkatkan kualitas informasi dan pengambilan keputusan. Temuan ini dapat dijelaskan melalui Teori Implementasi Kebijakan Publik yang menegaskan

bahwa implementasi kebijakan yang efektif menghasilkan output dan outcome sesuai tujuan. Oleh karena itu, penerapan SAP yang baik berdampak pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja keuangan organisasi pemerintah.

Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung Teori Stewardship, di mana standar akuntansi yang jelas dan terstruktur memberikan dukungan bagi steward dalam mengelola sumber daya publik secara optimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Mulyadi dan Ahmad Soleh (2020) serta Budhi Purwantoro Jati (2019) yang menemukan bahwa penerapan SAP berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan daerah. Namun, hasil ini berbeda dengan temuan Yanima Halawa dan Hairatun Nazah (2023) yang menunjukkan bahwa pengaruh SAP terhadap efisiensi keuangan tidak selalu signifikan, kemungkinan akibat perbedaan karakteristik organisasi, kapasitas SDM, dan pemanfaatan sistem informasi keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP No. 71 tahun 2010 memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan keuangan di BPKPD Kota Binjai. Penerapan SAP membantu menciptakan sistem pelaporan keuangan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Selain itu, pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah juga terkait dengan kinerja keuangan BPKPD Kota Binjai. Penerapan standar akuntansi yang baik mendorong tersedianya informasi keuangan yang lebih jelas dan akuntabel, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja keuangan.
3. Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Oleh karena itu, konsistensi dalam penerapan SAP perlu dijaga agar tujuan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan akuntabel dapat tercapai.

Saran

1. Bagi BPKPD Kota Binjai, penerapan SAP diharapkan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan regulasi, tetapi juga terintegrasi dengan pengelolaan keuangan berbasis kinerja agar informasi keuangan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja.
2. Pemerintah daerah disarankan memperkuat sinergi antara penerapan SAP dan pengelolaan kinerja keuangan melalui peningkatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran agar peningkatan kinerja keuangan dapat tercapai secara berkelanjutan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, seperti sistem pengendalian internal, efektivitas anggaran, atau tata kelola keuangan daerah, agar hasil penelitian yang diperoleh menjadi lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansah, D. (2024). Penilaian pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam akuntabilitas lembaga pemerintah. *Jurnal E-Bisma*.
- Halim, A. (2022). Pengantar akuntansi keuangan daerah (Edisi revisi). Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2021). Akuntansi sektor publik (Edisi kedua). Andi.
- Nugroho, R. (2020). Kebijakan publik: Formulasi, implementasi, dan evaluasi. Elex Media Komputindo.
- Purwanto, E.A., & Sulistyastuti, D.R. (2021). Implementasi kebijakan publik. Gava Media.
- Rahayu, S. (2021). Tantangan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan di pemerintah daerah: Studi kasus di Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 4(1), 22–35.
- Ramadhani, N., & Arief, F. (2020). Pelatihan Digital dan Pengembangan Kompetensi SDM di Sektor Publik. *Jurnal Administrasi Digital*, 4(2), 67–74.
- Rinaldi, A., & Yuliani, D. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Era Digitalisasi. *Jurnal Akuntansi dan Tata Kelola Pemerintahan*, 9(2), 112–123.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, D., & Mahardika, A. (2021). Pengaruh budaya organisasi dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 9(1), 34–47.